

KESETARAAN GENDER SEBAGAI PILAR PEMBANGUNAN MASYARAKAT: TANTANGAN, STRATEGI, DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

GENDER EQUALITY AS A FOUNDATION FOR SOCIAL DEVELOPMENT: CHALLENGES, STRATEGIES, AND POLICY DIRECTIONS

Fitri Yanti¹, Mutiara Ramadhani^{2*}, Fauzi Nadziiran Haq³, Devi Tias Pratiwi⁴

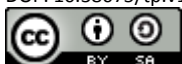
^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Raden Intan, Bandar Lampung, Indonesia

*E-Mail: Ramadhanimutiara016@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis persoalan gender dalam pengembangan masyarakat dengan menyoroti peran serta partisipasi perempuan di Indonesia. Ketimpangan gender masih menjadi hambatan serius bagi pembangunan inklusif, terutama dalam hal akses terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan representasi politik. Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui telaah literatur dan dokumen kebijakan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Pusat Statistik, serta laporan lembaga internasional. Analisis penelitian didasarkan pada perspektif teori gender dan pembangunan (*gender and development*), yang menekankan kesetaraan akses dan kesempatan sebagai prasyarat pembangunan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam partisipasi perempuan, kesenjangan struktural masih signifikan, terutama terkait norma budaya dan stereotip gender. Kebijakan pengarusutamaan gender telah diterapkan, namun implementasinya di tingkat lokal masih terbatas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengarusutamaan gender harus diposisikan sebagai strategi kunci dalam pembangunan masyarakat Indonesia. Rekomendasi penelitian selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam praktik baik (*best practices*) pengarusutamaan gender di tingkat lokal serta meneliti secara komparatif antarwilayah untuk mengidentifikasi pola yang efektif. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada penguatan wacana kesetaraan gender sekaligus memberikan dasar empiris bagi perumusan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif.

Kata kunci: kesetaraan gender; pembangunan masyarakat; partisipasi perempuan; pengarusutamaan gender; Indonesia



ABSTRACT

This study aims to analyze gender issues in community development by highlighting the role and participation of women in Indonesia. Gender inequality remains a serious barrier to inclusive development, particularly in terms of access to education, employment, health services, and political representation. The research employs a descriptive qualitative. Qualitative data were obtained from policy documents and reports published by the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection, the Central Bureau of Statistics, and international organizations. The analysis is grounded in the theoretical framework of gender and development, which emphasizes equal access and opportunities as prerequisites for sustainable development. The findings reveal that although there has been progress in women's participation, structural gaps remain significant, particularly those shaped by cultural norms and gender stereotypes. Gender mainstreaming policies have been introduced, yet their implementation at the local level remains limited. This study concludes that gender mainstreaming should be regarded as a key strategy for community development in Indonesia. Future research is recommended to examine best practices of gender mainstreaming at the local level and to conduct comparative studies across regions to identify effective patterns. Thus, this study contributes to strengthening the discourse on gender equality while providing empirical foundations for the formulation of more inclusive development policies.

Keywords: *gender equality; community development; women's participation; gender mainstreaming; Indonesia*

PENDAHULUAN

Pembangunan masyarakat adalah sebuah proses kompleks yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, budaya, dan politik dengan tujuan utama meningkatkan kualitas hidup seluruh anggota masyarakat. Namun, persoalan gender sering kali menjadi hambatan yang kurang mendapat perhatian serius dalam proses tersebut. Ketimpangan gender telah menjadi isu signifikan, khususnya di negara-negara berkembang yang masih memegang teguh norma-norma sosial tradisional. Norma tersebut kerap menghambat partisipasi perempuan secara setara dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Kondisi ketimpangan gender di

Indonesia tercermin dari pembagian peran yang kaku, stereotip tentang kemampuan perempuan, serta keterbatasan akses perempuan terhadap pendidikan dan peluang ekonomi (Nugraha, 2018a; 2018b). Faktor-faktor ini tidak hanya membatasi potensi individu, tetapi juga memperlambat laju pembangunan inklusif. Dalam konteks yang lebih luas, perempuan masih menghadapi tantangan dalam memperoleh hak-hak dasar seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Data dari Badan Pusat Statistik (2023) menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Gender Indonesia masih menghadapi kesenjangan signifikan, yang menandakan perlunya intervensi

kebijakan yang lebih sensitif gender.

Berbagai penelitian internasional telah menegaskan bahwa peningkatan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor kehidupan memberikan dampak positif terhadap pembangunan (Chant & Sweetman, 2020; Chigbu, 2021). Misalnya, peningkatan tingkat pendidikan perempuan berkontribusi pada perbaikan kesehatan keluarga dan stabilitas ekonomi rumah tangga. Namun, sebagian besar kajian tersebut masih menekankan manfaat partisipasi perempuan secara umum tanpa menelaah konteks lokal secara mendalam, terutama di Indonesia, di mana praktik pembangunan sering kali diwarnai ketimpangan gender yang bersifat struktural maupun kultural (Blackwood, 2005; Robinson, 2009).

Artikel ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menyoroti persoalan gender dalam kerangka pengembangan masyarakat di Indonesia, sekaligus menawarkan perspektif kritis mengenai urgensi pengarusutamaan gender dalam praktik pembangunan berbasis komunitas. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkuat temuan sebelumnya mengenai kontribusi perempuan, tetapi juga memperluas diskursus akademik dengan menekankan konteks lokal, yaitu bagaimana norma budaya, kebijakan publik, dan struktur sosial membentuk partisipasi perempuan dalam pembangunan masyarakat.

Namun demikian, upaya untuk mengintegrasikan perspektif gender

dalam kebijakan pembangunan masyarakat masih menghadapi berbagai hambatan. Banyak program pembangunan dirancang tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan kontribusi perempuan, yang justru memperparah ketimpangan yang ada (KPPPA, 2022; UN Women, 2021). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih sensitif gender dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan masyarakat. Pendekatan ini bertujuan memastikan seluruh kelompok, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kesempatan yang setara untuk berkontribusi dan menikmati hasil pembangunan.

Persoalan gender bukan hanya masalah keadilan sosial, tetapi juga prasyarat penting untuk mencapai pembangunan masyarakat yang berkelanjutan (Kabeer, 2019). Dengan mengatasi ketimpangan gender, sumber daya manusia dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa ada kelompok yang terpinggirkan. Oleh karena itu, memahami dan mengatasi isu gender, khususnya melalui pendekatan berbasis komunitas di Indonesia, merupakan langkah penting dalam menciptakan masyarakat yang inklusif, adil, dan berdaya saing.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena isu gender dalam pembangunan masyarakat tidak dapat dipahami hanya melalui data statistik, tetapi juga

memerlukan pemahaman kualitatif tentang pengalaman, peran, dan hambatan yang dialami perempuan dalam konteks sosial budaya Indonesia.

Data diperoleh melalui studi pustaka dan analisis dokumen. Sumber utama meliputi laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, publikasi Badan Pusat Statistik, dokumen kebijakan pemerintah daerah, serta laporan lembaga internasional seperti UNDP dan UN Women. Selain itu, data sekunder dari penelitian terdahulu turut ditelaah untuk memberikan perspektif komparatif. Analisis dokumen ini berfokus pada representasi partisipasi perempuan dalam pembangunan masyarakat dan kebijakan yang terkait dengan pengarusutamaan gender.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan dua langkah utama. Pertama, data kuantitatif dipaparkan untuk menunjukkan kondisi faktual mengenai ketimpangan gender dan tingkat partisipasi perempuan dalam pembangunan. Kedua, data kualitatif dianalisis menggunakan *thematic analysis* dengan menekankan isu-isu kunci seperti akses pendidikan, kesempatan ekonomi, representasi politik, serta norma budaya yang mempengaruhi peran perempuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengembangan Masyarakat

Pengembangan masyarakat merupakan upaya strategis untuk menciptakan kondisi sosial yang lebih

baik secara berkelanjutan, berlandaskan prinsip keadilan sosial, partisipasi, dan penghargaan terhadap keberagaman. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, konsep pengembangan masyarakat yang efektif tidak hanya menekankan pembangunan fisik, tetapi juga pemberdayaan individu maupun kelompok untuk menghadapi dan menyelesaikan persoalan sosial yang dihadapi. Hal ini sejalan dengan pandangan Ife (2016) bahwa pengembangan masyarakat harus berorientasi pada pemberdayaan sosial, partisipasi demokratis, dan keberlanjutan.

Menurut Darkenwald dan Merriam (1982), pengembangan masyarakat berintikan kegiatan sosial yang difokuskan untuk memecahkan masalah sosial. Dalam proses tersebut, batasan antara belajar dan bekerja sangat tipis, karena keduanya berjalan terpadu. Artinya, proses pembangunan masyarakat bukan hanya sebatas transfer pengetahuan, melainkan integrasi antara aktivitas pembelajaran dengan praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini menegaskan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi sekaligus subjek yang aktif dalam menciptakan perubahan sosial (Kenny, 2017).

Sejalan dengan itu, Twelvetrees (2008) mendefinisikan pengembangan masyarakat sebagai *"the process of assisting ordinary people to improve their own communities by undertaking collective actions."* Definisi ini menekankan dimensi kolaboratif, yaitu upaya untuk

membantu masyarakat meningkatkan kapasitas mereka melalui tindakan kolektif. Konsep tersebut menegaskan bahwa pengembangan masyarakat menuntut keterlibatan langsung masyarakat sebagai aktor utama yang menginisiasi perubahan dengan dukungan pihak eksternal. Dengan demikian, pengembangan masyarakat dapat dipahami sebagai upaya membangun kesadaran kritis sekaligus meningkatkan kapasitas kelompok sosial untuk menghadapi persoalan yang memengaruhi masa depan mereka (Ledwith, 2020).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan memainkan peran kunci dalam pengembangan masyarakat, terutama dalam aspek pendidikan anak, kesehatan keluarga, serta kegiatan ekonomi berbasis komunitas. Namun, partisipasi perempuan sering kali terhambat oleh norma sosial yang kaku dan stereotip gender. Misalnya, di beberapa wilayah penelitian ditemukan keterbatasan akses perempuan terhadap pendidikan dan peluang ekonomi, yang berdampak pada rendahnya keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan pembangunan. Temuan ini sejalan dengan laporan UN Women (2021) yang menunjukkan bahwa hambatan struktural dan kultural masih membatasi kontribusi perempuan dalam pembangunan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Dengan demikian, pemberdayaan perempuan dalam kerangka pengembangan masyarakat merupakan

syarat utama bagi terciptanya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan (Kabeer, 2019).

2. Persoalan Gender

Kata *gender* berasal dari bahasa Inggris yang berarti “jenis kelamin.” Sementara itu, istilah *gene* merujuk pada plasma pembawa sifat dalam keturunan. Secara terminologi, gender dipahami sebagai konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial dan budaya. Dengan demikian, gender merupakan hasil konstruksi sosial, bukan sesuatu yang bersifat kodrati. Oleh karena itu, gender berbeda dengan seks; gender merujuk pada dimensi sosial dan kultural, sedangkan seks mengacu pada perbedaan biologis yang melekat pada tubuh manusia (WHO, 2011; Fakih, 2013).

Istilah gender sering kali disamakan dengan jenis kelamin, namun pemahamannya mengalami pergeseran sejak dekade 1980-an hingga awal 1990-an. Pada awalnya, istilah gender digunakan untuk menekankan peran sosial yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan, tetapi sejak 2011 berkembang pula penggunaannya untuk menggambarkan identitas dan ekspresi diri seseorang, serta bagaimana individu berinteraksi dengan institusi sosial berdasarkan presentasi gender mereka (Connell, 2009; Butler, 2011). Pergeseran ini menandai pergeseran konseptual gender dari sekadar

kategori biner menuju pemahaman yang lebih kompleks dan dinamis.

Dalam *Webster's New World Dictionary*, gender diartikan sebagai "perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dari segi nilai dan tingkah laku." Sementara itu, *Women's Studies Encyclopedia* menjelaskan bahwa gender merupakan konsep kultural yang membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat (Lips, 2014). Definisi ini menegaskan bahwa gender dibentuk dan dinegosiasikan secara sosial dalam setiap komunitas, sehingga selalu terkait dengan konteks budaya dan historis tertentu.

Hilary M. Lips (2014), dalam bukunya *Sex & Gender: An Introduction*, mengartikan gender sebagai harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (*cultural expectations for women and men*). Hal ini sejalan dengan analisis Faqih (2013) yang menyebut bahwa perempuan sering diasosiasikan dengan sifat lemah lembut, cantik, emosional, dan keibuan, sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Namun, konstruksi ini bersifat cair, sehingga dapat berubah lintas waktu dan konteks. Misalnya, terdapat laki-laki yang lemah lembut atau perempuan yang kuat dan rasional. Hal ini membuktikan bahwa gender merupakan kategori sosial yang dapat dinegosiasikan.

Secara epistemologis, penelitian gender berakar pada paradigma feminisme yang berkembang dalam dua

teori utama, yaitu fungsionalisme struktural dan teori konflik. Perspektif fungsionalisme struktural berasumsi bahwa masyarakat terdiri atas bagian-bagian yang saling memengaruhi dan berfungsi menjaga keteraturan sosial. Sebaliknya, teori konflik menyoroti adanya ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan dan sumber daya, yang menciptakan ketegangan antara laki-laki dan perempuan. Kedua teori ini memiliki akar dalam pemikiran klasik sosiologi, seperti karya Auguste Comte (1798–1857) dan Herbert Spencer (1820–1930), serta kemudian diperkaya oleh teori feminis kontemporer (Ritzer & Stepnisky, 2017).

Persoalan gender yang sering muncul di lingkungan sosial berkaitan erat dengan ketimpangan struktural dan diskriminasi, baik terhadap perempuan maupun laki-laki. Contohnya meliputi kekerasan berbasis gender, kesenjangan gaji, rendahnya akses pendidikan bagi perempuan, hingga marginalisasi dalam ruang publik (UNDP, 2020; UN Women, 2021). Masalah-masalah ini menjadi tantangan serius yang harus diatasi untuk menciptakan masyarakat yang lebih setara, inklusif, dan berkeadilan. Dalam konteks pembangunan masyarakat, pengarusutamaan gender menjadi strategi kunci untuk mengurangi ketimpangan tersebut sekaligus memperkuat peran perempuan dalam pembangunan berkelanjutan (Kabeer, 2019).

3. Pengaruh Gender dalam Pengembangan Masyarakat

Kesetaraan gender memegang peranan penting dalam mencapai pembangunan masyarakat yang berkelanjutan dan inklusif. Perbedaan peran dan posisi laki-laki serta perempuan dalam masyarakat sering kali menghasilkan ketimpangan akses terhadap sumber daya, partisipasi, dan pengambilan keputusan. Ketimpangan ini tidak hanya memengaruhi individu, tetapi juga menghambat keberhasilan pengembangan masyarakat secara keseluruhan (UNDP, 2020; Kabeer, 2019).

a. Partisipasi Perempuan dalam Pengembangan Masyarakat

Partisipasi perempuan dalam pengembangan masyarakat masih terhambat oleh norma budaya dan stereotip gender. Kondisi ini membatasi kontribusi perempuan dalam pembangunan serta mengurangi representasi perspektif mereka dalam pengambilan keputusan. Padahal, perempuan memiliki pengetahuan lokal dan pengalaman yang relevan, khususnya dalam bidang pengelolaan sumber daya alam dan kesejahteraan keluarga (Cornwall, 2016). Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi perempuan dapat memberikan dampak positif, seperti memperbaiki indikator kesehatan, pendidikan, dan ekonomi masyarakat. Selain itu, keterlibatan perempuan mendorong pendekatan pembangunan yang lebih inklusif sehingga kebutuhan seluruh anggota masyarakat dapat

diakomodasi (UN Women, 2021; Sen, 2001).

b. Akses terhadap Sumber Daya Ekonomi

Ketimpangan gender berdampak signifikan terhadap akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi. Di berbagai wilayah, perempuan sering kali memiliki keterbatasan dalam mengakses aset seperti tanah, modal usaha, pendidikan, dan pelatihan keterampilan. Kondisi ini menyebabkan perempuan berada dalam posisi yang rentan dan membatasi kontribusi mereka dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal (World Bank, 2012). Peningkatan akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi, misalnya melalui program kredit mikro atau pelatihan keterampilan, terbukti meningkatkan kemandirian ekonomi mereka. Dampaknya tidak hanya mendukung kesejahteraan keluarga, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi masyarakat secara keseluruhan (Mayoux, 2005; Duflo, 2012).

c. Pengambilan Keputusan yang Inklusif Gender

Pengambilan keputusan yang inklusif gender merupakan elemen penting dalam pengembangan masyarakat. Studi menunjukkan bahwa kebijakan yang melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan cenderung lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat secara luas

(Agarwal, 2010). Namun, hambatan sosial sering kali membatasi perempuan untuk mengakses posisi kepemimpinan atau berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan tidak hanya memperkuat posisi mereka di masyarakat, tetapi juga menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif, khususnya terkait pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial (Beath, Christia, & Enikolopov, 2013). Kebijakan inklusif ini pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup seluruh anggota masyarakat.

d. Dampak Ketimpangan Gender terhadap Keberlanjutan Pembangunan

Ketimpangan gender memiliki dampak negatif terhadap keberlanjutan pembangunan masyarakat. Ketika perempuan tidak dilibatkan secara setara dalam proyek pembangunan, hasilnya sering kali tidak berkelanjutan atau hanya menguntungkan sebagian kelompok. Oleh karena itu, keterlibatan perempuan dalam pengelolaan sumber daya lokal dan perencanaan pembangunan jangka panjang sangat diperlukan (Kabeer, 2016). Program pembangunan yang mengintegrasikan perspektif gender mampu meningkatkan keberlanjutan pembangunan. Misalnya, keterlibatan perempuan dalam proyek pengelolaan air atau pertanian berkelanjutan sering kali menghasilkan keberhasilan lebih besar karena perempuan memiliki

pengetahuan lokal dan keterampilan pengelolaan yang relevan (Meinzen-Dick et al., 2014).

4. Tantangan Gender dalam Pengembangan Masyarakat

Tantangan gender dalam pengembangan masyarakat tetap menjadi isu yang relevan, khususnya di negara-negara berkembang. Kendala yang dihadapi perempuan dalam berpartisipasi penuh dalam pembangunan tidak hanya disebabkan oleh norma sosial dan budaya patriarkal, tetapi juga oleh keterbatasan akses terhadap sumber daya dan minimnya keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Faktor-faktor ini menghalangi kontribusi perempuan dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat secara menyeluruh (Kabeer, 2019; UNDP, 2020).

a. Hambatan Budaya dan Stereotip Gender

Hambatan budaya merupakan tantangan utama dalam integrasi perempuan dalam pengembangan masyarakat. Di banyak komunitas, norma patriarkal masih membatasi peran perempuan hanya pada ranah domestik seperti mengurus rumah tangga dan merawat anak. Stereotip ini membatasi peluang perempuan untuk terlibat aktif dalam kegiatan publik atau posisi pengambilan keputusan. Akibatnya, perempuan sering dipandang sebagai kelompok sekunder dengan kontribusi yang kurang diakui.

Persepsi bahwa laki-laki lebih “sesuai” sebagai pemimpin dalam perencanaan pembangunan memperburuk ketidaksetaraan gender ini (Connell, 2009; Fakih, 2013).

b. Ketimpangan Akses terhadap Sumber Daya

Ketimpangan akses terhadap sumber daya seperti tanah, modal usaha, pendidikan, dan pelatihan merupakan hambatan besar bagi perempuan. Di berbagai negara, perempuan sering terkendala dalam mengakses tanah atau hak kepemilikan karena kebijakan maupun praktik sosial yang diskriminatif. Hal ini menghambat kemandirian ekonomi perempuan dan membatasi kontribusi mereka dalam pembangunan komunitas. Minimnya akses ke modal usaha juga memperburuk kesenjangan gender dalam ekonomi lokal (World Bank, 2012; Meinzen-Dick et al., 2014).

c. Keterbatasan dalam Pengambilan Keputusan

Keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan di tingkat lokal masih rendah. Padahal, partisipasi perempuan dapat menghadirkan perspektif yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kurangnya representasi perempuan dalam posisi strategis menyebabkan pandangan mereka sering tidak terakomodasi dalam kebijakan pembangunan. Norma budaya yang menempatkan kepemimpinan sebagai ranah laki-laki

memperkuat hambatan ini (Agarwal, 2010; Beath, Christia, & Enikolopov, 2013).

d. Beban Ganda pada Perempuan

Perempuan kerap menghadapi beban ganda sebagai pencari nafkah sekaligus pengurus rumah tangga. Kondisi ini membatasi waktu dan energi mereka untuk berkontribusi dalam pembangunan masyarakat serta memperburuk ketimpangan gender. Beban ganda juga memperlambat partisipasi perempuan dalam kegiatan publik dan mengurangi kesempatan mereka untuk berkembang secara profesional maupun sosial. Ekspektasi sosial yang menempatkan perempuan hanya dalam peran domestik memperburuk integrasi mereka dalam pembangunan, karena sebagian besar waktu mereka dialokasikan untuk pekerjaan yang tidak dibayar (Hochschild & Machung, 2012; UN Women, 2021).

e. Kurangnya Dukungan Kebijakan yang Inklusif Gender

Minimnya kebijakan responsif gender menjadi tantangan dalam mengatasi ketimpangan. Banyak kebijakan pembangunan masih belum mempertimbangkan kebutuhan spesifik perempuan. Padahal, kebijakan yang inklusif gender perlu mencakup alokasi sumber daya yang adil, kesempatan pelatihan, dan akses ke pasar kerja yang setara. Tanpa kebijakan inklusif, integrasi perempuan dalam pembangunan akan terhambat dan

mereka akan tetap menghadapi hambatan struktural (True, 2012; UNDP, 2020).

f. Ketidakadilan Hukum dan Kurangnya Perlindungan Hukum

Ketidakadilan hukum dan lemahnya perlindungan bagi perempuan juga menjadi tantangan besar. Walaupun banyak negara memiliki undang-undang perlindungan perempuan, implementasinya sering belum memadai. Masalah utama meliputi kekerasan berbasis gender, diskriminasi dalam perceraian dan pewarisan, serta perlindungan kerja yang lemah. Perempuan masih menghadapi diskriminasi dalam penggajian, pelecehan seksual, dan pelanggaran hak pekerja (CEDAW Committee, 2019; UN Women, 2021).

g. Ketimpangan Ekonomi antara Gender

Ketimpangan ekonomi gender ditandai dengan kesenjangan upah, keterbatasan kesempatan kerja, dan beban pekerjaan tidak terbayar. Perempuan sering menerima upah lebih rendah daripada laki-laki untuk pekerjaan yang sama. Hambatan akses pekerjaan layak memperparah kesenjangan ini. Selain itu, pekerjaan domestik yang tidak diakui secara ekonomi membatasi kontribusi perempuan dalam pembangunan dan memperburuk ketidakadilan dalam pembagian kerja (Duflo, 2012; ILO, 2018).

h. Kesenjangan dalam Partisipasi Politik

Kesenjangan dalam partisipasi politik juga menjadi tantangan dalam mewujudkan kesetaraan gender. Representasi perempuan dalam lembaga politik masih rendah, menghambat pengambilan keputusan yang inklusif. Stereotip gender yang merugikan persepsi terhadap kompetensi perempuan dalam politik memperburuk hambatan tersebut. Selain itu, kurangnya dukungan, termasuk akses terhadap pendanaan kampanye dan jaringan politik, membatasi peluang perempuan untuk berpartisipasi penuh (Paxton & Hughes, 2014; Krook, 2020).

5. Strategi Berbasis Kesetaraan Gender dalam Pengembangan Masyarakat

Strategi berbasis kesetaraan gender bertujuan menciptakan pengembangan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan, di mana laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan setara untuk berpartisipasi serta memperoleh manfaat pembangunan. Pendekatan ini menempatkan kesetaraan gender sebagai faktor utama yang perlu dipertimbangkan dalam setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan hingga implementasi. Strategi tersebut tidak hanya memberikan dampak positif bagi perempuan, tetapi juga memperkuat pembangunan sosial-ekonomi masyarakat secara keseluruhan (Kabeer, 2019; UN Women, 2021).

a. Pentingnya Kebijakan Publik yang

Mendukung Kesetaraan Gender

Untuk mencapai kesetaraan gender, dibutuhkan kebijakan publik yang kuat dan berkelanjutan. Beberapa langkah penting adalah: pertama, penyusunan kebijakan inklusif yang menangani isu diskriminasi gender, kesenjangan upah, dan perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender. Kedua, implementasi dan pemantauan kebijakan secara efektif, termasuk evaluasi berkala untuk mengidentifikasi keberhasilan dan hambatan. Ketiga, penganggaran yang responsif gender, seperti dukungan finansial bagi program kewirausahaan perempuan, pelatihan keterampilan, dan layanan kesehatan reproduksi berkualitas (True, 2012; UNDP, 2020).

b. Pendekatan Pengarusutamaan Gender (Gender Mainstreaming)

Gender mainstreaming adalah pendekatan yang memastikan perspektif gender dimasukkan dalam setiap tahap pembangunan, dari perencanaan hingga evaluasi. Strategi ini menjamin bahwa kebijakan dan program mempertimbangkan dampak terhadap laki-laki dan perempuan secara setara. Implementasi gender mainstreaming menuntut analisis mendalam mengenai peran, kebutuhan, dan tantangan perempuan-laki-laki, serta pelatihan bagi pengambil kebijakan agar peka terhadap isu kesetaraan gender (Moser, 2005; Walby, 2005).

c. Penguatan Kapasitas dan

Keterampilan Perempuan

Penguatan kapasitas perempuan merupakan langkah penting dalam menciptakan kemandirian ekonomi dan sosial. Program ini dapat berupa pendidikan vokasional, pelatihan kewirausahaan, dan pengembangan kepemimpinan, sehingga perempuan dapat lebih berdaya dalam komunitasnya. Peningkatan kapasitas ini juga membuka peluang keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dan mempercepat pencapaian kesetaraan gender (Cornwall & Rivas, 2015; Hunt & Samman, 2016).

d. Partisipasi Aktif Perempuan dalam Berbagai Sektor

Partisipasi perempuan di sektor ekonomi, politik, dan sosial sangat penting untuk mewujudkan kesetaraan gender. Upaya yang dapat dilakukan antara lain: pertama, pemberdayaan ekonomi melalui akses terhadap modal, pelatihan keterampilan, dan jaringan bisnis. Kedua, peningkatan partisipasi politik dengan kuota keterwakilan perempuan, program pelatihan kepemimpinan, serta dukungan kapasitas politik. Ketiga, penempatan perempuan dalam posisi strategis untuk memperluas perspektif dalam pengambilan keputusan (Paxton & Hughes, 2014; Krook, 2020).

e. Kebijakan Responsif Gender dan Alokasi Anggaran yang Adil

Kebijakan pembangunan harus didukung dengan alokasi anggaran responsif gender. Hal ini mencakup

kesetaraan akses ke pendidikan, kesehatan, kredit usaha, dan sumber daya ekonomi lainnya. Anggaran yang adil memungkinkan program pemberdayaan perempuan berjalan lebih efektif serta mendorong terciptanya masyarakat inklusif (Budlender, 2005; UN Women, 2021).

f. Meningkatkan Kesadaran Gender

Kesadaran gender dapat dibangun melalui pendidikan dan kampanye sosial sejak usia dini. Pendidikan kesetaraan gender membantu mengurangi stereotip gender dan memperlemah norma patriarki. Kampanye sosial yang melibatkan laki-laki sebagai sekutu juga penting agar kesetaraan gender menjadi agenda bersama, tidak hanya isu perempuan (Flood, 2011; Connell, 2014).

g. Kolaborasi antara Berbagai Pihak

Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan strategi kesetaraan gender. Upaya yang dapat dilakukan antara lain: membangun koalisi antara pemerintah, LSM, sektor swasta, dan masyarakat sipil; membentuk jaringan dukungan untuk perempuan; serta memperkuat advokasi kebijakan pro-kesetaraan melalui kelompok masyarakat sipil dan pengaruh politik (Keck & Sikkink, 1998; O'Neil et al., 2014).

h. Pendekatan Partisipatif dalam Pengambilan Keputusan

Pendekatan partisipatif memberikan ruang bagi perempuan

untuk terlibat aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Partisipasi perempuan memungkinkan kebijakan lebih responsif dan representatif terhadap kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya inklusif, tetapi juga berkelanjutan (Agarwal, 2010; Gaventa, 2006).

i. Mendorong Peran Laki-Laki dalam Mempromosikan Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender bukan hanya tanggung jawab perempuan, tetapi juga laki-laki. Beberapa langkah penting adalah: pertama, pendidikan maskulinitas positif untuk mengubah perilaku diskriminatif. Kedua, keterlibatan laki-laki dalam aliansi kesetaraan gender. Ketiga, partisipasi laki-laki dalam pekerjaan domestik dan perawatan anak. Keempat, promosi kesetaraan di tempat kerja melalui kebijakan adil. Kelima, mendukung gerakan feminis sebagai sekutu aktif demi perubahan sosial yang lebih adil (Messner, 2016; Ruxton & van der Gaag, 2013).

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa kesetaraan gender merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan pembangunan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan. Hasil analisis menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam pengembangan masyarakat masih terhambat oleh hambatan budaya,

stereotip gender, keterbatasan akses terhadap sumber daya, serta minimnya representasi dalam pengambilan keputusan. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan struktural yang berdampak pada keterlambatan pembangunan sosial maupun ekonomi.

Strategi berbasis kesetaraan gender, seperti pengarusutamaan gender, penguatan kapasitas perempuan, partisipasi aktif dalam politik dan ekonomi, serta dukungan kebijakan yang responsif gender, terbukti mampu memperkuat posisi perempuan dan menghasilkan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif. Temuan ini memperlihatkan bahwa pembangunan berkelanjutan hanya dapat tercapai apabila perempuan dan laki-laki memperoleh akses serta kesempatan yang setara.

Dengan demikian, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kebijakan publik berbasis gender, peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, penyediaan akses ekonomi yang adil, serta kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan lingkungan sosial yang mendukung kesetaraan. Penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian pada level implementasi kebijakan di daerah, termasuk mengukur dampak nyata program kesetaraan gender terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agarwal, B. (2010). *Gender and green governance: The political economy of women's presence within and beyond community forestry*. Oxford University Press.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Indeks pembangunan gender Indonesia 2023. BPS RI. <https://www.bps.go.id>
- Beath, A., Christia, F., & Enikolopov, R. (2013). Empowering women through development aid: Evidence from a field experiment in Afghanistan. *American Political Science Review*, 107*(3), 540–557. https://doi.org/10.1017/S0003055413000302
- Blackwood, E. (2005). Gender transgression in colonial and postcolonial Indonesia. *The Journal of Asian Studies*, 64(4), 849–879. <https://doi.org/10.1017/S002191180500227X>
- Budlender, D. (2005). Expectations versus realities in gender-responsive budget initiatives. *UNRISD*.
- Butler, J. (2011). *Gender trouble: Feminism and the subversion of identity*. Routledge.
- CEDAW Committee. (2019). *Concluding observations on the combined reports of state parties*. United Nations.

- Chant, S., & Sweetman, C. (2020). Fixing women or fixing the world? 'Smart economics', efficiency approaches, and gender equality in development. *Gender & Development*, 20(3), 517–529. <https://doi.org/10.1080/13552074.2012.731812>
- Chigbu, U. E. (2021). Women and development in Africa: A critical review. *Journal of Gender Studies*, 30(4), 1–17. <https://doi.org/10.1080/09589236.2020.1825212>
- Connell, R. (2014). Rethinking gender from the South. *Feminist Studies*, 40(3), 518–539. <https://doi.org/10.15767/feministstudies.40.3.0518>
- Connell, R. (2009). *Gender in world perspective* (2nd ed.). Polity Press.
- Cornwall, A., & Rivas, A. M. (2015). From “gender equality” and “women’s empowerment” to global justice: Reclaiming a transformative agenda for gender and development. *Third World Quarterly*, 36(2), 396–415. <https://doi.org/10.1080/01436597.2015.1013341>
- Darkenwald, G. G., & Merriam, S. B. (1982). *Adult education: Foundations of practice*. Harper & Row.
- Duflo, E. (2012). Women empowerment and economic development. *Journal of Economic Literature*, 50(4), 1051–1079. https://doi.org/10.1257/jel.50.4.1051
- Fakih, M. (2013). *Analisis gender dan transformasi sosial*. Insist Press.
- Flood, M. (2011). Involving men in efforts to end violence against women. *Men and Masculinities*, 14(3), 358–377. <https://doi.org/10.1177/1097184X10363995>
- Gaventa, J. (2006). Triumph, deficit or contestation? Deepening the “deepening democracy” debate. *IDS Working Paper*, 264.
- Hochschild, A., & Machung, A. (2012). *The second shift: Working families and the revolution at home*. Penguin.
- Hunt, A., & Samman, E. (2016). Women’s economic empowerment: Navigating enablers and constraints. *ODI Research Report*.
- Ife, J. (2016). *Community development in an uncertain world: Vision, analysis and practice*. Cambridge University Press.
- ILO. (2018). *Global wage report 2018/19: What lies behind gender pay gaps*. International Labour Organization.
- Kabeer, N. (2016). Gender equality, economic growth, and women’s agency: The “endless variety” and “monotonous similarity” of patriarchal constraints. *Feminist Economics*, 22(1), 295–321. <https://doi.org/10.1080/13545701.2015.1090009>
- Kabeer, N. (2019). Gender, livelihood capabilities and women’s economic empowerment. *Gender & Development*, 27(1), 49–65. <https://doi.org/10.1080/13552074.2019.1570730>
- Keck, M. E., & Sikkink, K. (1998). *Activists beyond borders: Advocacy networks in international politics*. Cornell University Press.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). (2022). *Profil gender Indonesia 2022*. KPPPA RI.

- Kenny, S. (2017). *Developing communities for the future*. Cengage Learning.
- Krook, M. L. (2020). *Violence against women in politics*. Oxford University Press.
- Ledwith, M. (2020). *Community development: A critical and radical approach*. Policy Press.
- Lips, H. M. (2014). *Sex & gender: An introduction (6th ed.)*. Waveland Press.
- Mayoux, L. (2005). Microfinance and women's empowerment: Rethinking "best practice." *Development Bulletin*, 57, 76–81.
- Meinzen-Dick, R., Quisumbing, A., Doss, C., & Theis, S. (2014). Women's land rights as a pathway to poverty reduction: Framework and review of available evidence. *Agricultural Systems*, 172, 72–82. <https://doi.org/10.1016/j.agsy.2017.10.009>
- Messner, M. A. (2016). Forks in the road of men's gender politics: Men's rights vs feminist allies. *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, 5(2), 6–20. <https://doi.org/10.5204/ijcsd.v5i2.301>
- Moser, C. O. N. (2005). Has gender mainstreaming failed? A comment on international development agency experiences in the South. *International Feminist Journal of Politics*, 7(4), 576–590. <https://doi.org/10.1080/14616740500284573>
- Nugraha, F. (2018a). *Mereka Yang Keluar: TKW dan Perubahan Sosial di Perdesaan*. Bandung: Lekkass.
- Nugraha, F. (2018b). Gerakan Ekonomi Keagamaan dan Politik Identitas Muslim Pedesaan: Studi di BMT Dana Akhirat Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung. *Jurnal Bimas Islam*, 11(4), 693–722.
- O'Neil, T., Domingo, P., & Valters, C. (2014). Progress on women's empowerment: From technical fixes to political action. *ODI Research Paper*.
- Paxton, P., & Hughes, M. M. (2014). *Women, politics, and power: A global perspective (2nd ed.)*. CQ Press.
- Ritzer, G., & Stepnisky, J. (2017). *Sociological theory (10th ed.)*. Sage.
- Robinson, K. (2009). *Gender, Islam and democracy in Indonesia*. Routledge.
- Ruxton, S., & van der Gaag, N. (2013). *Men and masculinities in development: Broadening our work towards gender equality*. Zed Books.
- True, J. (2012). *The political economy of violence against women*. Oxford University Press.
- Twelvetrees, A. (2008). *Community work*. Palgrave Macmillan.
- UNDP. (2020). *Human Development Report 2020: The next frontier – Human development and the Anthropocene*. United Nations.
- UN Women. (2021). *Progress of the world's women 2021–2022: Families in a changing world*. United Nations.
- Walby, S. (2005). Gender mainstreaming: Productive tensions in theory and practice. *Social Politics*, 12(3), 321–343. <https://doi.org/10.1093/sp/jxi018>
- WHO. (2011). *Gender mainstreaming for health managers: A practical approach*. World Health Organization.